

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian terhadap kerusakan lingkungan hidup (*enviromental damage*) telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Hal tersebut di dasari dari adanya dampak langsung yang dialami oleh manusia dari berbagai kerusakan lingkungan terutama hutan. Karena manusia sangat memahami, bahwa hutan adalah elemen penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Udara yang dihirup oleh manusia dan makhluk hidup berasal dari hutan. Begitupun kebutuhan lain, manusia dan makhluk hidup bergantung pada hutan. Hubungan antara manusia, lingkungan hidup (hutan) dan makhluk lainnya sudah lama terbangun, bahkan hampir separuh penduduk bumi ini menggantungkan kehidupan pada hutan. Hutan tidak hanya sebagai penyeimbang iklim golbal, namun juga sebagai sumber pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat (Niman, 2019).

Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor alam dalam proses ekologi yang mendukung keberlangsungan kehidupan (Reksohadiprodjo, 2000). Fungsi hutan begitu vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya justru mengalami persoalan serius yaitu dengan munculnya berbagai aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya hutan yang begitu luas. Akibatnya hutan rusak atau beralih fungsi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa wilayah Indonesia sekitar 60% adalah hutan. Tahun 2020 luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 95.6 juta hektar atau 50,9 % dari total daratan dan hal ini menjadikan Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar di dunia. Namun kondisi saat ini cukup memprihatinkan dengan berbagai fonemena kerusakan hutan yang mengakibatkan semakin menurunnya luas hutan tropis di Indonesia (Dongche, 2021).

Kerusakan hutan di Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika dilihat dari data KLHK tahun 2016, hutan di Indonesia mengalami kerusakan mencapai 47 % atau sekitar 8.431.969 hektar, kerusakan hutan tersebut terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi, Kerusakan hutan yang berada di luar kawasan hutan yaitu berjumlah 53 % atau 9.629.204 hektar (Niman, 2019).

Menurut *Forest Watch Indonesia (FWI)* sekalipun deforestasi dan degradasi hutan sebesar 1,5 juta hektare/tahun periode 2001-2010 dan menurun pada periode 2009-2013 lajunya turun tepatnya sebesar 1,1 juta hektare/tahun (Forest Watch Indonesia, 2018). Kendati demikian kecenderungan deforestasi dan degradasi hutan selalu naik. Hal tersebut terjadi sejak lama atau tepatnya sejak 1990-an (Forest Watch Indonesia, 2018). Potret kerusakan di 3 provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara sebagai bukti parahnya kerusakan hutan. Sisi lain deforestasi di Indonesia nampaknya masih cukup tinggi, hal tersebut terlihat pada data tahun (2009-2013) yaitu pada angka 146 ribu hektar sementara pada periode tahun 2013-2016 yaitu sekitar 240 ribu hectare ini artinya cukup meningkat. Jika kita mengkalkulasikan telah hilang seluar 718 hektar hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara kurun waktu tiga tahun. Selain itu dari analisis lainnya tingkat defortasi di tiga provinsi tersebut sekitar 72 persen dan itu semua berada di dalam wilayah yang telah dibebani izin pengelolaan (Forest Watch Indonesia, 2018). Kerusakan hutan juga merambah wilayah timur Indonesia seperti Papua yaitu 592.976,75 ha (1.98%), wilayah lainnya yaitu Maluku dengan jumlah hutan yang rusak yaitu 242.567 Ha atau (5,30 %) (Niman, 2019).

Sedangkan di Provinsi NTB berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018 total area hutan yang rusak akibat perambahan hutan atau perladangan, pembalakan liar, ilegal logging, dan pertambangan yaitu sebanyak 896 ribu hektar (Muhammad Nursyamsi, 2018). Rincian kerusakan hutan virgin yang terbuka mencapai angka 597 dan sekitar

316 hektarnya mengalami kerusakan dan daerah yang paling kritis kondisi hutannya yaitu berada di pulau Sumbawa yaitu Kabupaten Bima dan Dompu yaitu sekitar 35-40 persen area hutannya mengalami kerusakan. Fenomena kerusakan hutan tersebut tidak hanya merusak sistem ekologi yang ada. Namun telah membawa kerugian besar bagi masyarakat itu sendiri dengan munculnya berbagai bencana banjir serta kekeringan yang hampir terjadi setiap tahunnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Tahun 2016 mencatat banjir telah merendam sejumlah rumah di Kota Bima serta mengakibatkan 105.753 jiwa warga terdampak (Ramdhani, 2016). Selain itu, banjir juga telah merusak 44 rumah rusak berat dan 8.491 jiwa mengungsi dan beberapa fasilitas publik seperti jalan, fasilitas kesehatan, peribadatan, dan sekolah mengalami kerusakan sehingga prediksi kerugian mencapai 1 triliun lebih (Ramdhani, 2016). Kemudian, tidak hanya di Kota Bima, April 2021 kemarin banjir melanda 4 kecamatan di kabupaten Bima yaitu Kecamatan Monta, Woha, Madapangga, Bolo. Banjir ini mengakibatkan sekitar 7.598 unit rumah terendam dengan ketinggian air 50-200 sentimeter. Sementara itu ada 23.362 jiwa terdampak (CNN, 2021). Fenomen lain yang tidak kalah mengkhawatirkan yaitu berkurangnya pasokan air bersih dan sepanjang tahun 2019. BPBD mencatat ada 39 Desa di 11 Kecamatan di Kabupaten Bima mengalami kekurangan air bersih dan kekeringan ini hampir setiap tahun terjadi (Nickyrawi, 2019).

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB Ir. Madani Makarom (2021) penyebab paling utama kerusakan hutan di Provinsi NTB khususnya di Kabupaten Bima yaitu perambahan hutan atau perladangan menempati urutan pertama, disusul ilegal logging, serta pertambangan (Observasi langsung, 2021). Sementara di Kabupaten Bima sendiri terdapat empat daerah atau wilayah yang tingkat kerusakan hutannya cukup parah yaitu Kecamatan Parado, Wawo, dan Ambalawi dan kerusakan hutan tersebut akibat perladangan untuk membuka lahan baru dalam rangka penanaman jagung. Jika dilihat dari berbagai fenomena kerusakan hutan di

Kabupaten Bima sangat relevan dengan pendapat Aryadi (2000) yang menyebutkan bahwa umumnya tindakan ilegal logging dan eksploitasi hutan terjadi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa memperhatikan kebutuhan pertumbuhan masyarakat sekitar hutan (Niman, 2019).

Hal lainnya Bencek dan K Ghimire (2003) menegaskan aktivitas manusia yang tidak memperhatikan konservasi keragaman hayati memiliki dampak negatif pada pembangunan lingkungan berkelanjutan (Becker & Ghimire, 2003). Selain itu Rautner dan Sumarni dalam Niman (2019) mengatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam menata pelestarian lingkungan ditambah lagi dengan meninvestasi pengembangan permasalahan sosial dan lingkungan yang saling terkait mengakibatkan kemampuan daya dukung alam terhadap kehidupan manusia semakin rendah. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang melanggar etika lingkungan serta tidak tepat penggunaannya semakin memperparah rusaknya lingkungan hutan (Niman, 2019). Dengan kata lain perilaku manusia dan dampak teknologi mengakibatkan kesenjangan interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Kondisi lingkungan alam yang terus mengalami degradasi sebagai dampak kerusakan secara terus menerus tersebut mengancam keselamatan manusia seperti adanya bencana longsor, banjir, menurunnya debit air, dan lain-lain.

Hutan yang rusak atau lingkungan tak hanya berdampak pada kehidupan manusia saja. Hutan juga berpengaruh pada kelangkaan keragaman hayati, rusaknya kesuburan tanah, hilangnya habitat satwa, bermasalahnya hidrologi yang melahirkan kondisi pemanasan global. Kondisi alam tersebut merupakan dampak dari adanya masalah lingkungan yang dirasakan oleh seluruh spesies di planet bumi ini termasuk di Indoensia. Berangkat dari problem besar tersebut dibutuhkan satu kesadaran yang hakiki yaitu kesadaran ekologi yang harus dimiliki oleh masyarakat di negara manapun termasuk di Indonesia. Hal ini menjadi penting dilakukan sebab hal yang utama dan dicurigai sebagai tidak adanya rasa untuk menghargai dan menghormati lingkungan alam yaitu kurangnya masyarakat menjadikan nilai lokal sebagai satu acuan dalam

kehidupan. Selain itu nilai-nilai tersebut juga harusnya dijaga, dipahami, dan dilestarikan sehingga dapat diketahui oleh generasi selanjutnya.

Salah satu masyarakat lokal yang memiliki nilai-nilai ekologi dalam kearifan lokal adalah masyarakat Bima. Kenyataan saat ini perkembangan eksistensi kearifan lokal tersebut sudah mulai pudar dan mengalami degradasi warisan nilai luhur. Menurut Tilaar (2000) kearifan lokal telah pudar secara eksistensi di beberapa kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa degradasi nilai-nilai moral dan sosial budaya sudah terjadi di masyarakat (Ardan et al., 2015). Penyebab umum degradasi nilai budaya, yakni perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Mungmachon, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, Suastra (2010) menjelaskan bahwa penyebab degradasi moral, yakni semakin mudarnya budaya asli yang memiliki nilai-nilai luhur dan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Selain itu, kurangnya dukungan dan semangat masyarakat untuk memelihara, melestarikan dan mempertahankan serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi lokal (Suastra, 2010).

Masalah lain juga yaitu kelangkaan nilai kearifan lokal ditandai dengan semakin kurangnya kesadaran cara bertani masyarakat. Seperti di lereng gunung dengan kemiringan mulai 40 derajat, petani menanaminya padi, jagung, dan lain-lain. Kemudian, mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di masa lalu telah banyak yang hilang, padahal dalam aturan adat hal itu sangat berlawanan dan melanggar. Kemerosotan nilai kearifan lokal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan iklim di Bima. Perubahan iklim yang paling dirasakan oleh masyarakat yaitu meningkatnya suhu panas di Bima. Selain itu, cuaca dan musim yang tidak beraturan. Untuk peningkatan suhu panas di Bima, sampai saat ini Bima dikategorikan sebagai daerah terpanas di Indonesia. Suhu terpanas di Bima pernah mencapai 39 derajat dan suhu rata-rata di siang hari yaitu 32-33 derajat (Ibrahim, 2021). Kemudian, musim dan cuaca di Bima tidak lagi menentu, berdampak sistemik terhadap pertanian dan lain-lain. Oleh sebab itu, disertasi ini mengajukan argumen, bahwa kerusakan hutan yang berdampak

pada bencana alam seperti banjir, kekeringan dan perubahan iklim dapat diatasi dengan mengembalikan nilai kearifan lokal *Maja Labo Dahu*, sebagai falsafah hidup masyarakat Bima yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, alam dan tuhan. Sebab hidupnya kearifan lokal di tengah masyarakat sangat berdampak langsung bagi keberlangsungan ekosistem dan terjaganya area hutan dan lingkungan seperti pada masyarakat Badui di Banten, Suku Kajang yang ada di Bulukumbu, serta kampung Naga yang ada di Tasik Malaya yang masih menjaga nilai-nilai kearifan lokal.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Kearifan lokal *maja labo dahu* telah memudar dan tidak lagi diamalkan sebagai satu tindakan atau pandangan hidup di masyarakat.
2. Kegiatan manusia seperti perladangan, illegal logging, dan pertambangan mengakibatkan ratusan hektar hutan telah rusak dan beralih fungsi.
3. Bencana banjir menjadi satu ancaman setiap tahun yang dialami oleh hampir setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bima
4. Perubahan iklim (cuaca panas), Kekeringan, dan kekurangan air bersih setiap tahun dialami oleh masyarakat bima.

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat terbatasnya anggaran dan bahan lainnya sehingga permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam pembahasan kearifan lokal *Maja Labo Dahu* ritual Parafu, upacara adat, sangksi adat, hutan adat yang berkaitan dengan lingkungan dan lokasi penelitian ada di Kabupaten Bima.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka penelitian ini terdapat Rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah kearifan lokal *Maja Labo Dahu* masih dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat Bima?
2. Mengapa kerusakan lingkungan berupa kerusakan hutan masih terus berlangsung di Kabupaten Bima?

3. Bagaimana model revitalisasi kearifan lokal *Maja Labo Dahu* dalam penyelamatan lingkungan di Kabupaten Bima?

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan fungsi hutan di Kabupaten Bima yang sudah rusak akibat berbagai aktivitas manusia seperti perladangan liar, illegal iloging dan lainnya yang dapat berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat melahirkan kembali sikap dan perilaku masyarakat yang memiliki pemahaman dalam menjaga dan merawat lingkungan serta tidak berlebihan dalam memanfaatkan hutan.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu.

1. Menjelaskan peran kearifan lokal *Maja Labo Dahu* sebagai pedoman kehidupan dan menemukan model revitalisasi kearifan lokal sebagai upaya pencegahan resiko kerusakan hutan di Kabupaten Bima.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Kajian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya pengembalian fungsi hutan dengan membumikan kembali nilai lokal "*Maja Labo Dahu*" untuk mengembangkan sikap dan perilaku masyarakat.

#### **H. State Of The Art**

Masifnya kerusakan hutan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ditambah dengan bencana kekeringan serta cuaca panas yang terjadi hampir sepanjang tahun tentunya tidak muncul secara kebetulan. Hal tersebut bermula dari aktifitas manusia yang tidak lagi menjaga dan merawat lingkungan terutama hutan di area pegunungan di Kabupaten Bima. Jika dilihat secara letak wilayah dan geografis Kabupate Bima merupakan daerah yang hampir semua wilayahnya di Kelilingi oleh gunung dan bukit yang ditumbuhin oleh berbagai pohon dan tumbuhan seperti kasambi, loka, kemiri, jati dan pepohonan lainnnya.



Bahkan di beberapa gunung tersebut sebagian masyarakat menggantungkan nasib mereka dengan melakukan kegiatan menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, kacang. Tradisi itu telah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat Bima dengan menggarap lahan masing-masing. Namun belakangan ini kegiatan yang awalnya hanya sebagai pemenuhan keperluan hidup sehari-hari kini berubah dengan eksploitasi besar-besaran terhadap hutan dengan melakukan penggundulan hutan mulai dari perembahan untuk perladangan serta ilegal logging.

Berbagai kegiatan tersebut disinyalir bermula ketika program PIJAR tahun 2012 yang mulai digaungkan oleh Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang dengan komoditas utamanya adalah jagung. Sejak program digulirkan ditambah dengan harga jagung sangat menjanjikan dan cara menanam yang mudah dan praktis membuat animo warga semakin meningkat. Sehingga tidak heran setiap warga harus membuka lebih dari puluhan hektar lahan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Namun sisi lainnya semua itu harus dibayar mahal sebab semakin meningkatkannya pendapatan masyarakat dari hasil jagung, tidak sebanding dengan kerusakan hutan yang ditimbulkan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi NTB menyebutkan bahwa total area hutan yang rusak akibat perladangan, pembalakan liar, ilegal logging, dan ipertambangan yaitu sebanyak 896 ribu hektar dengan rincian hutan virgin yang terbuka mencapai angka 597 dan sekitar 316 hektarnya mengalami kerusakan dan daerah yang paling kritis kondisinya yaitu berada di pulau Sumbawa yaitu Kabupaten Bima dan Dompu yaitu sekitar 35-40 persen area hutannya mengalami kerusakan. Fenomena-fenomena di atas tentunya harus dibayar mahal oleh masyarakat itu sendiri. Sebab perubahan iklim seperti cuaca yang semakin panas, banjir, serta kekeringan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat di Kabupaten Bima dan bencana-bencana tersebut hampir setiap tahun terjadi dan menyisahkan kerugian besar baik materiil dan korban jiwa.



Berdasarkan hasil observasi langsung dengan mewawancarai seorang budayawan yaitu Alan Malingi mengungkap fakta bahwa masalah lainnya di Kabupaten Bima yaitu pudarnya kearifan loka masyarakat Bima dalam kehidupan sehari-hari yaitu “*Maja Labo Dahu*”. Pandangan hidup atau nilai lokal ini tidak lagi dijalankan dengan baik sehingga masyarakat tidak memiliki pegangan dalam melakukan kegiatan sosial apalagi dalam hal perladangan sehingga tidak heran tindakan merusak hutan semakin masif terjadi. Sisi lain telah ditemukan fakta bahwa beberapa daerah di Kabupaten Bima yang masih hidup budaya asli lokalnya seperti hutan-hutan yang ditetapkan sebagai hutan parafu yang kuat akan nilai luhurnya justru masih terjaga dan bahkan sumber mata airnya menjadi sumber kebutuhan masyarakat seperti desa yang ada di Kecamatan Lambitu, Donggo, dan Tambora. Dari penjabaran di atas peneliti menemukan bahwa kebaruan dalam penelitian ini yaitu dalam kondisi kekinian perlunya nilai-nilai lokal dihidupkan kembali. Hal ini sejalan dengan penelitian Suparmini, Sryadi Setiawati, Dyha Respati Suryo Sumunar terkait “pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal” yang dipublikasi pada Jurnal uny.ac.id. Dalam penelitian tersebut para peneliti menemukan bahwa terjagannya area hutan di sekitar wilayah tinggal masyarakat Baduy karena mereka masih mempertahankan nilai-nilai lokal yang dimiliki. Sedangkan pada masyarakat di Kabupaten Bima sama-sama memiliki nilai kearifan lokal seperti masyarakat Baduy bahkan sebagian masyarakat masih memegang kearifan lokal akan tetapi kondisi hutannya sudah sangat rusak.

Selain itu penelitian yang terkait dengan kearifan lokal dalam pencegahan kerusakan lingkungan masih minim dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Ilham terkait disertasi dengan judul “Pengembangan Model Pendidikan Alquran Dalam Pembentukan Akhlak Mulia Peserta Didik Untuk Mewujudkan Motto *Maja Labo Dahu* Kota Bima (Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bima-NTB)”. Dari hasil penelitian dan temuan menunjukkan bahwa SDN di Kota Bima Visi, Misi dan Tujuan pendidikan Al-Quran menekankan pada visi terbentuknya peserta didik fasih membaca menghafal Al-Quran, Kurikulum dan materi pendidikan Al-Quran disediakan untuk memberikan

kesempatan peserta didik untuk memiliki pemahaman Al-Quran melalui membaca, menulis, menghafal Al-Quran, ibadah dan doa-doa, Proses pendidikan Al-Quran dilaksanakan dalam pembelajaran Alquran menggunakan metode iqro dan bagdadiyah, sementara evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran Alquran baik melalui bacaan dan hafalan Alquran, dukungan masyarakat dan pemerintah meliputi keikutsertaan masyarakat dalam sumbangan pemikiran (usul saran, kehadiran dalam rapat) dan dana serta kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan Alquran. Artinya penelitian ini lebih fokus kepada pendidikan Alquran terhadap anak dan tidak membahas hal yang dengan terkait “*Maja Labo Dahu* Dalam pencegahan kerusakan lingkungan”.

Begitupun penelitian terkait *Maja Labo Dahu* yang dilakukan Hamidsyukrie zm dengan judul disertasi kekerasan rumah tangga dalam budaya *Maja Labo dahu* orang Bima Dalam penelitian hanya fokus pada kajian kekerasan rumah tangga dalam budaya “*Maja Labo Dahu*”. Berangkat dari uraian di atas serta berbagai jurnal dan karya ilmiah yang ditelaah atau di cari oleh peneliti sangat jarang ditemukan penelitian yang berkaitan dengan “*Maja Labo Dahu* dalam pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bima”. Dari minimnya penelitian terkait dengan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan ditambah lagi dengan kerusakan hutan yang begitu masif membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan ketertarikan itupun melahirkan beberapa pertanyaan yang peneliti tuangkan dalam rumusan masalah.